

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena krisis ekonomi di negara Asia. Di mulai saat terjadinya krisis moneter, lalu menjalar menjadi krisis multidimensi. Namun, Indonesia dapat pulih dari krisis walaupun relatif menghabiskan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang juga terkena krisis ekonomi.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia setelah krisis menunjukkan arah yang positif, pertumbuhan ekonomi negatif hanya terjadi satu tahun saja yaitu tahun 1998 dan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 terjadi pertumbuhan ekonomi positif rata-rata 3,2 % per tahun. Namun disisi lain diketahui bahwa keadaan ini tidak berasal dari nilai Investasi. Pada periode tersebut nilai Investasi negatif. Penurunan nilai Investasi ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingginya tingkat suku bunga, peraturan dan kepastian hukum yang lemah, serta infrastruktur yang kurang memadai, hal ini membuat investor cenderung menanamkan modalnya di negara lain yang memiliki iklim investasi lebih kondusif dibandingkan di Indonesia.

Setelah terjadinya krisis moneter tahun 1997-1998, investasi yang disalurkan ke dalam ekonomi Indonesia turun secara drastis, bahkan terjadi pelarian modal (*capital flight*) \$ 10 milyar setiap tahun (Mubyarto, 2003, Teori

investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Pancasila, www.jurnal.com). Sejak krisis, nilai investasi di Indonesia cenderung menurun. Tahun 2002 nilai persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, hanya mencapai Rp 25,3 triliun dan US\$ 9,7 miliar. Di Jawa Tengah Penanaman modal dalam negeri juga mengalami penurunan. Pada tahun 2001, proyek PMDN di Jateng berjumlah 26 unit dengan nilai investasi Rp 2,9 triliun, sedangkan pada tahun 2002 jumlah proyek hanya 14 unit dengan nilai investasi Rp 1,5 triliun (Ato (2004), Pengusaha UKM Mendominasi Investasi, diambil 15 Maret 2005, dari <http://wire.ap.org>).

Saat terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan ekonomi menurun. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 4,9 persen pada tahun 1996 menjadi 6,1 persen pada tahun 2000, pangsa pekerja sektor formalpun berkurang menjadi 35,1 (Aloysius Gunadi Brata, 2002, Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi. Sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh sektor-sektor usaha besar dan konglomerasi yang mengalami keterpurukan bisnis, dan kebangkrutan (Aloysius Gunadi Brata, 2002, Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi, www.jurnal.kerakyatan.com). Namun disisi lain, selama krisis berlangsung ada kegiatan ekonomi yang dapat *survive* dan bisa bertahan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan menunjukkan arah yang positif, sayangnya hal ini tidak disertai dengan peningkatan nilai investasi.

Melihat kenyataan di atas maka timbul suatu pertanyaan: Mengapa pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah perekonomian yang tumbuh tidak disertai dengan laju pertumbuhan nilai investasi, ada suatu teka-teki di dalamnya. Apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini?. Hal ini pula yang menjadi suatu hal yang menarik yang ingin diketahui. Karena ternyata ada *hidden economy* yang membuat perekonomian Indonesia maju. Adapun *hidden economy* ini diduga oleh banyak masyarakat sebagai ekonomi rakyat, dalam hal ini adalah UKM. Perekonomian tersembunyi atau dikenal sebagai ekonomi rakyat inilah yang memberi sumbangan cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia. Namun perekonomian tersembunyi yang menguntungkan ini justru kurang mendapat dukungan dari pemerintah.

UKM mempunyai peranan strategis dalam struktur perekonomian nasional. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Jumlah industri kecil dan menengah di Indonesia mencapai 99,9 persen dari total seluruh unit usaha. Kedua, memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Tiap unit investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar ataupun menengah. Pada tahun 1999, ternyata UKM menyerap 99,4 persen dari seluruh tenaga. Ketiga, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal, memegang peranan utama dalam pengadaan produk dan jasa bagi masyarakat, dan secara langsung menunjang kegiatan usaha yang berskala lebih besar. Keempat, UKM memberikan sumbangan sebesar 59,4 persen dari

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 1999. (Maulana Ibrahim (2002), Kemiskinan, UKM dan Bank Sentral, dari www.kompas.com).

Berdasarkan info koperasi No.25 Tahun XX, 2004, Usaha mikro, kecil dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang. Selama periode 2000-2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000-2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UKM merupakan katup pengaman, dinamisator dan stabilitator perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha

Pada Tahun 2000 dan 2003 (orang)

No	Skala Usaha	2000	2003	Pertumbuhan
1	Usaha Mikro dan Kecil	62.856.765 (88,79)	70.282.178 (88,43)	7.425.413 (11,81%)
2	Usaha Menengah	7.550.674 (10,67)	8.754.615 (11,02)	1.203.941 (15,94%)
3	Usaha Besar	382.438 (0,54)	438.198 (0,55)	55.760 (14,58%)
Jumlah Tenaga Kerja		70.789.877 (100)	79.474.991 (100)	8.685.114 (12,27%)

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Kontribusi UKM pada ekspor non migas terus mengalami peningkatan secara perlahan, dan Rp 75.448 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp 75.859

milyar pada tahun 2003, sedang usaha besar mengalami penurunan dari Rp 314.518 milyar menjadi Rp 305.397 milyar pada periode yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel2.

Tabel2. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Skala Usaha
Pada Tahun 2000 dan 2003 (Milyar Rupiah)

No	Skala Usaha	2000	2003	Perkembangan
1	Usaha Mikro dan Kecil	21.136.510 (5,42)	20.464.869 (5,37)	- 671.641
2	Usaha Menengah	54.312.096 (13,93)	55.394.449 (14,53)	+ 1.082.353
3	Usaha Besar	314.518.682 (81,63)	305.397.028 (80,10)	- 9.121.654
	Jumlah Nilai Ekspor	389.957.289 (100)	381.256.346 (100)	- 8.700.943

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Pada sisi lain, usaha mikro dan kecil penggunaan bahan baku impornya relatif rendah (5.8%) jika dibandingkan dengan usaha menengah (9.3%) dan usaha besar (14,7%). Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif untuk neraca pembayaran Indonesia. Dewasa ini struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan menggambarkan bahwa dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebanyak 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian maka usaha menengah, kecil dan mikro merupakan mayoritas pelaku usaha karena mencapai 98% dari total unit usaha.

Pemerintah dengan dukungan dunia usaha dan swasta seharusnya perlu melihat lebih dalam dan memperhatikan sektor ekonomi rakyat ini yang meliputi

usaha kecil dan menengah, karena melalui sektor inilah perekonomian dapat tumbuh dengan lebih kokoh disebabkan pondasi perekonomian rakyat yang kuat. Pemulihan ekonomi nasional dari krisis yang berkepanjangan justru terletak pada ekonomi rakyat yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi, sehingga melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat inilah diharapkan dapat mewujudkan kekuatan ekonomi nasional.

Untuk itulah, penelitian ini berusaha meyakinkan dan mengkonfirmasi apakah UKM benar-benar memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah investasi berpengaruh positif terhadap output nasional pada masa krisis dan pada masa normal.
2. Bagaimana pertumbuhan output UKM pada masa krisis dan setelah krisis.
3. Bagaimana pertumbuhan output non UKM pada masa krisis dan setelah krisis.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi terhadap output nasional.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perkembangan output UKM dan Non UKM terhadap pertumbuhan perekonomian.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, besar harapan penulis agar dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Memberikan tambahan informasi mengenai peranan yang diberikan oleh sektor UKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Untuk kepentingan penelitian suatu Perguruan Tinggi, yang secara teoritis merupakan wujud nyata pelaksanaan dari salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Dharma penelitian.
3. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian, dan di harapkan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi, sehingga nantinya dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan ataupun kebijaksanaan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang diamati, hipotesis penelitian, dan metodologi penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan pengkajian dari hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

3. BAB III LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan definisi-definisi dan teori-teori yang menjelaskan variabel-variabel yang sedang diteliti.

4. BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode analisis yang digunakan dalam membuktikan kontribusi UKM terhadap perekonomian Indonesia.

5. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis dari hasil penelitian yang sedang diteliti secara keseluruhan.

6. BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan hasil analisis dan implikasi praktis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Dyah Ratih Sulistyastuti (1998)

Penelitian Dyah Ratih Sulistyastuti yang berjudul “Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001)”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Konsentrasi untuk menguji pola konsentrasi geografis tiap propinsi.

Variabel yang berpengaruh terhadap Dinamika Usaha Kecil dan Menengah adalah tenaga kerja UKM propinsi, tenaga kerja UKM Indonesia, jumlah penduduk propinsi, dan jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang telah dianalisis dalam penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi UKM di Indonesia selama 1999-2001 tidak merata antar wilayah.
2. Pertumbuhan UKM terkonsentrasi di wilayah pulau Jawa terutama Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
3. Distribusi UKM yang terdapat di pulau Jawa sebesar 65%, Pulau Sumatera 15%, Pulau Kalimantan sebesar 6%, Pulau Sulawesi sebesar 5%, selebihnya tersebar di Nusa Tenggara dan Papua.

4. Menurut perhitungan Indeks Konsentrasi, terdapat 12 propinsi (48%) dimana sektor UKM memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja diatas peran nasional.

2.2. Penelitian Galuh Retno Safitri (1999)

Penelitian Galuh Retno Safitri yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Pemberian Kredit Komersial Bank kepada UKM Ditinjau dari Aspek Keuangan”. Alat Analisis yang digunakan adalah analisis model linear regresi berganda.

Variabel yang berpengaruh terhadap Kelayakan Pemberian Kredit Komersial Bank kepada UKM adalah kinerja UKM dan kebutuhan kredit UKM.

Dalam penelitiannya, Galuh Retno Safitri memperoleh sembilan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam membiayai kinerja perusahaan, UKM cenderung menggunakan modal sendiri daripada modal yang diperoleh dari hutang.
2. Sebagian besar UKM yang menjadi obyek penelitian memiliki kategori tingkat kesehatan “SEHAT” jika dihitung berdasarkan keputusan menteri BUMN No:Kep 100/MBU/2002, hanya satu debitur saja (perusahaan C) yang memiliki kategori tingkat kesehatan “KURANG SEHAT”.
3. Karena obyek penelitian adalah UKM yang bergerak di sektor perdagangan, maka kebutuhan kreditnya bertujuan untuk menambah modal kerja guna memperluas dan meningkatkan kegiatan usahanya.

4. Laporan keuangan yang disyaratkan oleh Bank kepada UKM saat mengajukan kredit adalah laporan keuangan untuk dua tahun yang lalu dan satu tahun berjalan terhitung sebelum pengajuan kredit.
5. Kelayakan pemberian kredit komersial Bank kepada UKM tidak dapat dinilai tanpa memperhitungkan aspek-aspek keuangan, diantaranya adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini (kinerja UKM dan kebutuhan kredit UKM).
6. Variabel-variabel bebas (kinerja UKM dan kebutuhan kredit UKM) secara bersama-sama atau serentak berpengaruh kuat terhadap pemberian kredit komersial bank kepada UKM.
7. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini (kinerja UKM dan kebutuhan kredit UKM) seluruhnya berpengaruh positif tetapi tidak seluruhnya signifikan terhadap pengukuran kelayakan pemberian kredit komersial bank ke UKM. Hanya jumlah kebutuhan kredit UKM saja yang berpengaruh signifikan terhadap penilaian kelayakan pemberian kredit komersial Bank kepada UKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi kelayakan pemberian kredit komersial bank kepada UKM adalah jumlah kebutuhan kredit UKM.
8. Jumlah kredit yang dinilai layak untuk disalurkan pada UKM selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kebutuhan dana (modal kerja) yang diperlukan atau diajukan UKM.
9. Dalam memberikan kreditnya, bank lebih cenderung memperhitungkan kesungguhan debitur dalam mengalokasikan dana pinjamannya dan

prospek usahanya di masa yang akan datang dengan penggunaan kredit yang diberikan.

2.3. Penelitian Yuddy Mulyadi Hidayat (1999)

Penelitian Yuddy Mulyadi Hidayat yang berjudul “Peran Kredit Investasi terhadap Nilai Output Industri Besar dan Sedang Propinsi DIY tahun 1975-1997”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis model linear dengan metode shazam versi 6.1.

Variabel yang berpengaruh terhadap nilai output industri besar dan sedang adalah jumlah modal industri besar dan sedang, jumlah kredit investasi dari perbankan, upah riil tenaga kerja pada harga konstan 1993.

Dalam penelitiannya Yuddy Mulyadi Hidayat memperoleh empat kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel-variabel penjelas yaitu modal industri, kredit investasi, dan upah riil tenaga kerja atas harga konstan 1993 yang digunakan dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap nilai output industri besar dan sedang propinsi DIY.
2. Bahwa modal industri berpengaruh positif terhadap nilai output industri besar dan sedang pada harga konstan 1993.
3. Bahwa kredit investasi berpengaruh positif terhadap nilai output industri besar dan sedang pada harga konstan 1993.

4. Bahwa upah riil tenaga kerja berpengaruh positif terhadap nilai output industri besar dan sedang pada harga konstan 1993.

2.4. Penelitian Wijanto Hadipuro (1998)

Penelitian Wijanto Hadipuro yang berjudul “Kajian tentang Keberhasilan Kebijakan Kemitraan Usaha Besar-Menengah-Kecil (Pengembangan Metodologi Evaluasi Kebijakan dan Penerapannya pada Program Tebu Rakyat Intensifikasi)”. Alat analisis yang digunakan ada beberapa metode antara lain analisis *Content Analysis* untuk menganalisis tujuan, pihak yang terlibat dan indikator biaya kebijakan. *Analisis manfaat dan biaya* yang dipergunakan untuk pembuatan alat ukur evaluasi. Analisis perfomansi dari sisi kesejahteraan stakeholder, daya saing, dan pemerataan yang akan dipergunakan sebagai indikator manfaat, dan proses hirarki analitik yang akan dipergunakan untuk menyusun indikator-indikator perfomansi.

Berdasarkan data yang telah dianalisis dalam penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada sembilan bentuk kebijakan kemitraan usaha besar, menengah dan kecil yaitu kemitraan dengan koperasi, program penanggalan, inti-plasma, modal ventura, hapak angkat, tata niaga, kepemilikan saham usaha besar oleh koperasi, waralaba, dan kredit bersubsidi.
2. Tujuan kebijakan tidak diperhatikan semua pihak yang terlibat dalam kemitraan khususnya BUMN, tujuan tidak di jabarkan lebih lanjut

dalam kriteria keberhasilan yang dapat diukur, tujuan antar bentuk kemitraan berbeda-beda sehingga tidak bisa di perbandingkan sementara sasaran pelaku dan biayanya relatif sama.

3. Hasil pembuatan alat ukur menunjukkan bahwa pada manfaat kebijakan secara berturut-turut unit usaha yang tangguh dan mandiri mendapat bobot tertinggi, disusul kesejahteraan, pemerataan dan pertumbuhan. Pada biaya kebijakan biaya dari swasta mendapat bobot tertinggi disusul biaya dari BUMN, pemerintah, dan masyarakat. Bobot bersifat relatif, dan tidak bisa dipergunakan selamanya, jika kondisi berubah sebaiknya dilakukan pembobotan yang baru.
4. Penerapan evaluasi pada program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) menunjukkan bahwa regulasi pemerintah gagal mencapai sasarannya yaitu meningkatkan pendapatan petani tebu rakyat dan secara keseluruhan regulasi tersebut ternyata menurunkan performansi kemitraan (periode 1990-1993 performansinya lebih rendah dibandingkan dengan periode 1983-1990 dari 89,6 menjadi 37,7).

2.5. Penelitian Obed Umbu Kaballu (1997)

Penelitian Obed Umbu Kaballu yang berjudul “Strategi Bertahan Usaha Kecil Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi”. Alat Analisis yang digunakan adalah analisis model linear regresi berganda.

Berdasarkan data yang telah di analisis dalam penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar usaha kecil konveksi dapat mempertahankan dan meningkatkan volume produksi mereka pada masa krisis ekonomi, dengan strategi peningkatan harga jual hasil produksi.
2. Peningkatan volume produksi yang dilakukan oleh para pengusaha kecil dilakukan bukan karena kesadaran bahwa penambahan volume produksi tersebut dapat secara proporsional mengurangi biaya-biaya maupun kerugian. Akan tetapi peningkatan tersebut dipicu oleh peningkatan jumlah permintaan dan keinginan pengusaha untuk meningkatkan jumlah keuntungan.
3. Dari sudut pemasaran, tidak diperoleh informasi adanya pengusaha-pengusaha kecil yang secara sengaja melakukan promosi yang dapat meningkatkan jumlah penjualan mereka. Baik sebelum krisis maupun pada masa krisis, promosi hanya dilakukan dari mulut ke mulut. Dan berdasarkan hasil data yang diteliti sebagian besar unit-unit usaha yang diteliti selalu dapat menjual habis barang-barang yang diproduksi dalam sebulan.
4. Barang-barang yang diproduksi oleh unit-unit usaha kecil konveksi tersebut juga pada umumnya tidak mempunyai merek. Jika ada barang-barang mereka yang di pasar mempunyai label atau merek maka menurut beberapa responden kemungkinan label atau merek tersebut dibuat oleh distributor mereka.

5. *Survive*-nya usaha-usaha kecil konveksi tersebut tidak disebabkan karena strategi atau kiat khusus yang sengaja dilakukan oleh pengusaha, tetapi karena produk yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan diskusi bahwa: Pada penelitian yang pertama oleh Dyah Ratih Sulistyastuti merupakan penelitian yang bersifat eksploratif yang meneliti usaha kecil dan menengah secara luas, yaitu “Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001)”.

Pada penelitian kedua oleh Galuh Retno Safitri dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Pemberian Kredit Komersial Bank kepada UKM Ditinjau dari Aspek Keuangan” merupakan penelitian yang lebih berfokus pada unsur yang terdapat pada objek yang diteliti yaitu mengenai faktor-faktor kelayakan pemberian kredit.

Penelitian diatas lebih ditekankan lagi pada penelitian ketiga oleh Yuddy Mulyadi Hidayat yang berjudul “Peran Kredit Investasi terhadap Nilai Output Industri Besar dan Sedang Propinsi DIY tahun 1975-1997”, yaitu peneliti lebih menekankan kepada peran kredit itu sendiri terhadap objek yang diteliti khususnya peran kredit investasi.

Pada penelitian ke empat oleh Wijanto Hadipuro yang berjudul “Kajian tentang Keberhasilan Kebijakan Kemitraan Usaha Besar-Menengah-Kecil

(Pengembangan Metodologi Evaluasi Kebijakan dan Penerapannya pada Program Tebu Rakyat Intensifikasi)”, lebih menekankan pada unsur kemitraan yang merupakan salah satu faktor pendukung objek yang diteliti (UKM).

Pada penelitian ke lima oleh Obed Umbu Kaballu yang berjudul “Strategi Bertahan Usaha Kecil Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi” memaparkan mengenai upaya-upaya UKM untuk bertahan saat menghadapi krisis ekonomi.

Maka dalam penelitian yang sedang dilakukan ini, peneliti meneruskan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti bukan hanya memaparkan mengenai kondisi perkembangan UKM pada masa krisis saja, akan tetapi juga meneliti kondisi perkembangan UKM setelah krisis dan lebih memfokuskan pada kontribusi UKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BAB III

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

3.1. Pengertian Investasi

Investasi diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membina industri-industri. Dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi meliputi hal-hal berikut (Sadono Sukirno, 1994):

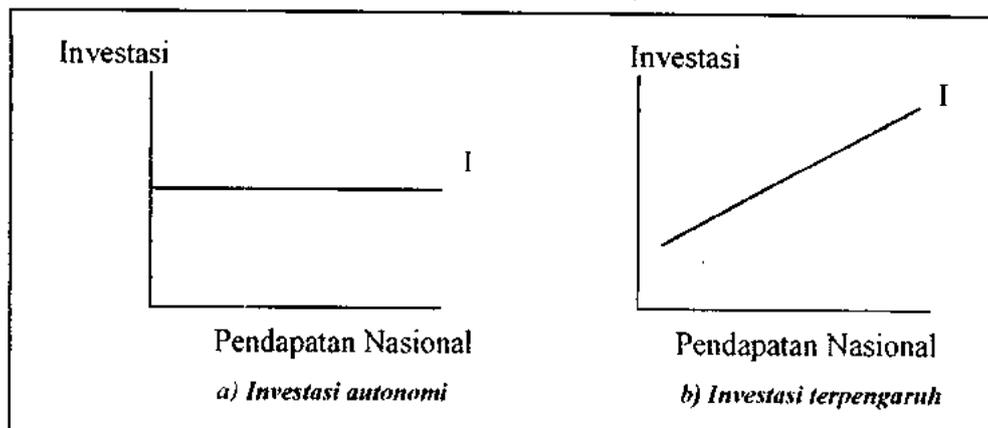
1. Seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan perbelanjaan untuk mendirikan industri-industri.
2. Pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah tempat tinggal.
3. Pertambahan dalam nilai-nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi (Jika nilai stok barang dalam perusahaan berkurang, maka ia merupakan investasi negatif).

Keseluruhan nilai seperti di jelaskan diatas dinamakan investasi agregat bruto atau pembentukan modal bruto. Apabila investasi bruto di kurangi oleh depresiasi maka akan di dapat investasi netto. Investasi netto bertujuan untuk memperbesar

kemampuan perusahaan (dari perekonomian secara keseluruhan) untuk memproduksi barang (mempertinggi kapasitas produksi).

Investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi juga dibagi menjadi tiga: investasi tetap bisnis, investasi tetap residensi dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi residensi adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan.

Investasi yang dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat pendapatan nasional yang dicapai, tingkat bunga yang berlaku, kemajuan teknologi dan ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Apabila faktor-faktor ini tidak berubah, tingkat investasi akan tetap sama besarnya pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Investasi seperti ini dinamakan investasi autonomi (*autonomous investment*). Apabila investasi naik seiring dengan naiknya pendapatan nasional maka dinamakan investasi terpengaruh (*induced investment*).



Gambar 3.1. Jenis Investasi

Tujuan investasi yang dilakukan oleh penanam modal berbeda dengan yang dilakukan oleh konsumen atau rumah tangga (RT) yang membelanjakan sebagian besar dari pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, tetapi penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan melainkan untuk mencari keuntungan.

Investasi pada gilirannya tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya.

3.2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan atas harga konstan, jadi perubahan dari nilai pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi.

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami suatu pertumbuhan atau berkembang, apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada apa yang dicapai oleh masa dari sebelumnya. Secara singkat ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional ke cara-cara baru yang lebih efektif.

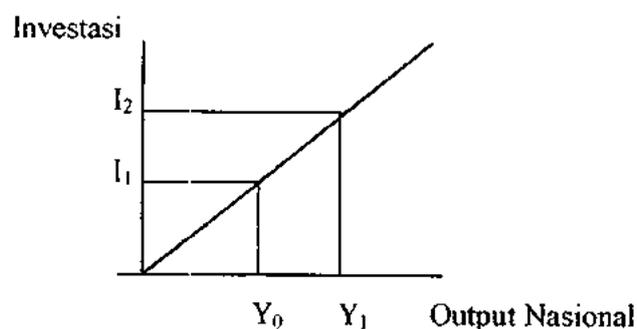
3.3. Pengaruh Investasi terhadap Output Nasional

Dalam melakukan perhitungan output nasional ada dua konsep yang digunakan yaitu konsep kewilayahan dan konsep kewarganegaraan. Output nasional atau Pendapatan nasional menurut konsep kewilayahan menghitung besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri maupun yang dihasilkan oleh warga negara asing. Besarnya perhitungan pendapatan nasional yang menggunakan konsep kewilayahan ini disebut angka GDP (Gross Domestik Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto). Konsep kewarganegaraan menghitung pendapatan nasional berdasarkan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari luar negeri disebut GNP (Gross National Product) atau PNB (Produk National Bruto).

GDP nominal mengukur nilai barang dan jasa dalam suatu periode tertentu menurut harga pasar yang berlaku pada periode tersebut. GDP riil mengukur semua

nilai barang dan jasa dalam periode tertentu menurut harga pasar pada periode dasar. Dengan mengetahui besarnya nilai GDP nominal dan GDP riil, maka akan didapatkan deflator GDP yang merupakan rasio antara GDP nominal dan GDP riil. GDP deflator sendiri merupakan indikator inflasi yang terbaik karena di dasarkan atas perhitungan yang meliputi semua barang yang diproduksi dalam perekonomian.

Produsen dengan mendasarkan asumsi rasionalitas, hanya mau mengadakan investasi selama proyek investasi tersebut diperkirakan akan mendatangkan keuntungan. Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah proyek investasi dapat mendatangkan keuntungan adalah permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut cukup memadai. Meningkatnya tingkat pendapatan nasional memiliki kecenderungan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang dikonsumsi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pendapatan nasional berhubungan positif terhadap pengeluaran investasi.



Gambar 3.2. Hubungan antara Investasi dengan output nasional

Misalkan pada awalnya investasi I_1 pada tingkat output nasional Y_0 . Dengan adanya kenaikan dari Y_0 ke Y_1 akan memperluas kegiatan ekonomi, kenaikan permintaan tersebut akan memperluas penanaman modal baru, sehingga dengan anggapan tingkat bunga yang sama r , maka akan ada investasi yang meningkat I_2 pada saat output nasional Y_1 .

Meningkatnya pendapatan nasional mencerminkan kemampuan masyarakat dinegara tersebut untuk hasil produksi (*ability to purchase*) sehingga akan merangsang investor untuk meningkatkan investasinya. Selain itu, tingginya pendapatan suatu negara mencerminkan kemampuannya dalam mengembalikan modal (*ability to pay*). Hal tersebut akan menarik investor untuk menanamkan modal yang ditanamkan di masa yang akan datang akan mendatangkan keuntungan (Ahmad Jamli. 1996.).

3.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Solow, Denison, Kendrick, dll. Teori Neo Klasik ini menggunakan pendekatan fungsi produksi agregat, kemudian dilacak sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Secara singkat pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = f(K, L, T)$$

Dimana, Y adalah produksi nasional, K adalah modal atau stok kapital (tabungan dan investasi), L adalah stok tenaga kerja dan T adalah teknologi. Secara singkat bahwa jika K dan L bertambah maka Y juga bertambah, tetapi pertumbuhan Y juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya (residual), dalam perkembangannya residual ini disebut sebagai teknologi, dan akhir-akhir ini disebut sebagai *total faktor productivity (TFP)*. T dapat terjadi karena berbagai hal antara lain:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman atau *on the job training*.
2. Realokasi sumberdaya dari kegiatan produktivitas rendah ke kegiatan dengan produktivitas lebih tinggi.
3. Pendayagunaan atas *economics of scale*.
4. Cara-cara yang lebih baik dalam produksi dan distribusi pada umumnya.

3.5. Teori Harrod Domar

Teori Harrod Domar merupakan teori makro investasi dalam jangka panjang. Menurut Harrod Domar, pengeluaran investasi mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat yaitu proses multiplier dan terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

Setiap ada peningkatan stok kapital masyarakat (K) meningkat pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output potensial (Y). Hubungan antara stok kapital (K) dengan output potensial (Y) merupakan hubungan ekonomis secara

langsung disebut rasio modal output (COR). Misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih pada stok kapital (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut.

Harrod Domar menitikberatkan bahwa akumulasi kapital itu mempunyai peran ganda yaitu menimbulkan pendapatan dan disamping itu menimbulkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar persediaan kapital. Secara sederhana teori Harrod Domar misalnya pada suatu keseimbangan pada tingkat *full employment income*, maka untuk memelihara keseimbangan dari tahun ke tahun dibutuhkan jumlah pengeluaran, karena investasi itu harus cukup untuk menyerap kenaikan output yang ditimbulkannya.

Jika $COR = K$, rasio kecenderungan menabung ($MPS = S$) dan proporsi tetap dari output total dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka model pertumbuhan ekonomi yang sederhana dapat disusun sebagai berikut:

1. Tabungan (S) merupakan proporsi (S) dari output total (Y) maka persamaannya adalah.

$$S = s.Y$$

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan ΔK maka:

$$I = \Delta K$$

Tetapi karena stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan output total (Y), seperti ditunjukkan oleh COR atau K , maka:

$$\frac{K}{Y} = k \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} = k \text{ atau } \Delta K = k \cdot \Delta Y$$

3. Mengingat bahwa tabungan total (S) harus sama dengan investasi total (I) maka $S = I$

Dari persamaan-persamaan di atas diperoleh:

$$S = s \cdot Y = k \cdot \Delta Y = \Delta K = I \text{ atau } s \cdot Y = k \cdot \Delta Y$$

Maka:
$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

Dimana:

$\frac{\Delta Y}{Y}$ menunjukkan tingkat pertumbuhan output (persentase perubahan output).

$\frac{s}{k}$ menunjukkan rasio antara tabungan dan modal output.

Persamaan data di atas merupakan persamaan Harrod Domar yang disederhanakan, yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan (S) dan rasio modal output (COR = K). Secara lebih spesifik, persamaan itu menunjukkan tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan, maka tinggi tabungan dan di investasikan, makin tinggi pula output. Sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif (makin besar COR makin rendah tingkat

pertumbuhan output). COR menunjukkan besarnya modal yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan satu rupiah output (PDRB) atau berapa kenaikan output (PDRB dalam rupiah) yang dihasilkan akibat adanya kenaikan investasi.

Agar bisa tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian haruslah menabung dan berinvestasi. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian itu akan semakin cepat.

3.6. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Non UKM

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan jumlah tenaga kerjanya jenis usaha dapat di klasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Usaha Besar, yaitu usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari 250 orang karyawan.
2. Usaha Sedang, yaitu usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 250 orang karyawan.
3. Usaha Kecil, yaitu usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 4 sampai 19 orang karyawan, dan
4. Usaha Rumah tangga, yaitu usaha yang hanya memiliki 1 sampai 3 orang tenaga kerja termasuk pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar.

UKM sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia merupakan unit usaha kecil dan menengah yang berbasis pada ekonomi rakyat yang umumnya terdiri dari koperasi, pengusaha mikro (termasuk di dalamnya unit usaha rumah tangga), pengusaha kecil dan pengusaha menengah, dimana kegiatannya diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia.

Adapun kriteria umum UKM adalah sebagai berikut:

1. Bahan bakunya mudah diperoleh, terutama karena tersedia di daerah.
2. Menggunakan teknologi sederhana dan mudah dilakukan alih teknologi.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup kemungkinan sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor.
6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat yang secara ekonomis menguntungkan.

Sedangkan pengertian non-UKM adalah kegiatan usaha yang bergerak diluar usaha UKM yang dapat termasuk di dalamnya usaha-usaha formal, perbankan, maupun perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tenaga kerja lebih dari 250 orang karyawan.

3.7. Pertumbuhan UKM dan Non UKM di Indonesia

Untuk menggambarkan realitas pertumbuhan UKM dan non UKM di Indonesia maka perlu melihat data empiris yang menggambarkan upaya pemulihan jumlah unit usaha dari krisis ekonomi sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perbandingan Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha Pada Tahun 1997 dan 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Milyar Rupiah)

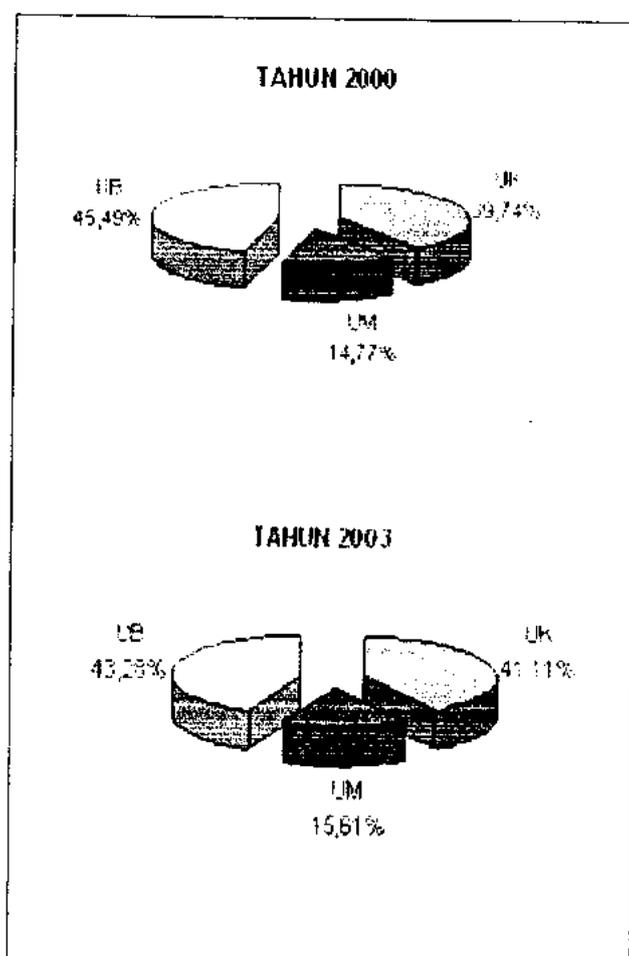
No	Skala Usaha	1997	2003	Pertumbuhan
1	Usaha Kecil dan Mikro	171.048 (40,45%)	183.125 (41,11%)	+7,06%
2	Usaha Menengah	78.524 (17,41%)	75.975 (16,61%)	-3,25%
3	Usaha Besar	183.673 (42,17%)	185.352 (41,28%)	+0,91%
	Jumlah PDB	433.245 (100%)	444.453 (100%)	+2,59%

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Data pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa UKM mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM terhadap PDB (tanpa migas) pada tahun 1997 tercatat sebesar 57,86 persen dan pada tahun 2003 kontribusinya relatif stabil 57,72 persen. Sedangkan kontribusi non-UKM (usaha besar) terhadap PDB pada tahun 1997 sebesar 42,17 persen dan tahun 2003 sebesar 41,28 persen.

Selama periode 2000-2003 peranan Usaha Kecil dalam penciptaan nilai tambah terus meningkat dari 39,7 persen pada tahun 2000 menjadi 41,1 persen pada tahun 2003. Sebaliknya peranan Usaha Besar semakin berkurang dari 45,5 persen pada tahun 2000 menjadi 43,3 persen pada tahun 2003. Sementara peranan Usaha Menengah relatif stabil berkisar 15 persen selama periode ini. (www.depkop.go.id. (18-03-2005))

Gambar 3.3. Peranan PDB Tahun 2000 dan 2003



Sumber: Kementerian KUKM - www.depkop.go.id.

Selama 2000-2003 iklim investasi pada berbagai tingkat skala usaha masih belum berubah. Dalam kurun waktu 2000-2003 Usaha Kecil masih merupakan kelompok yang paling rendah penyerapan investasinya yaitu rata-rata sebesar 18,58 persen per tahun dan diikuti oleh Usaha Menengah rata-rata sebesar 23,05 persen per tahun serta Usaha Besar 58,37 persen. Secara keseluruhan penyerapan investasi pada Usaha Kecil dan Menengah hanya mencapai 41,6 persen per tahun.

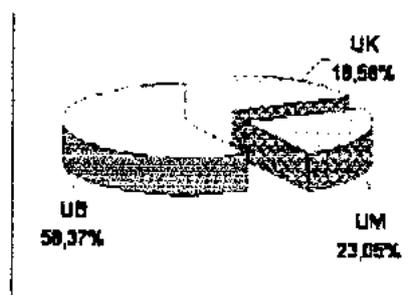
Tabel 3.2.

Rerata Investasi, Investasi Per Unit dan Pertumbuhan Investasi Menurut Skala Usaha Periode Tahun 2000 2003

Skala Usaha	Investasi (Milyar Rp)	Pangsa (%)	Investasi per unit (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
Mikro dan Kecil	58.884	18,58	1,5	4,98
Menengah	73.191	23,05	1.290,60	6,12
Besar	185.043	58,37	91.424,20	4,64
Total	317.118	100	7,9	5,56

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Gambar 3.4. Rata-rata Penyerapan Investasi Tahun 2000-2003



Sumber: Kementerian KUKM - www.depkop.go.id.

Pada periode 2000-2003 secara rata-rata tingkat investasi pada Usaha Kecil adalah sebesar Rp 58,9 triliun per tahun dan Usaha Menengah sebesar Rp 73,2 triliun per tahun atau masing-masing setara dengan Rp 1,5 juta per usaha untuk kelompok kecil dan Rp 1,3 miliar per usaha untuk kelompok menengah. Hal ini sangat mencolok bila dibandingkan dengan Usaha Besar yang menyerap Rp 91,4 miliar per unit usaha.

Rendahnya investasi usaha mikro dan menengah merupakan indikasi terbatasnya kelompok usaha ini dalam mengakses sumberdaya produktif terutama pembiayaan pengembangan usahanya. Keterbatasan akses pembiayaan ini mengakibatkan usaha kecil dan menengah berkonsentrasi pada sektor yang padat karya dengan produktivitas relatif rendah.

Iklim investasi belum mampu mendatangkan investasi pada sektor usaha kecil dan menengah, meskipun UKM khususnya usaha kecil merupakan kelompok usaha yang paling efisien penggunaan investasinya. Fenomena ini mengindikasikan usaha kecil dan menengah akan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika investasi diarahkan pada usaha kecil dan menengah.

Keberadaan UKM di Indonesia juga terkait masalah untuk mengatasi pengangguran dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia selama periode 1998-2001 jumlah unit usaha UKM mengalami pertumbuhan rata-rata 11% pertahun (Deperindag, 2002). Pertumbuhan UKM memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 3.3. Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan UB di Indonesia selama tahun 1998-2001 (Ribu rupiah)

Tahun	1998	1999	2000	2001
Unit Usaha*				
UKM	2.144,44 (99,97%)	2.536,22 (99,97%)	2.724,67 (99,97%)	2.885,82 (99,97%)
UB	0,63 (0,03%)	0,67 (0,03%)	0,71 (0,03%)	0,76 (0,03%)
Tenaga Kerja**				
UKM	8.329,53 (97,4%)	10.135,52 (97,85%)	10.708,42 (97,85%)	11.363,76 (97,85%)
UB	220,97 (2,6%)	222,31 (2,15%)	234,88 (2,15%)	249,25 (2,15%)

Sumber: Deperindag, (2002)

* = Unit Usaha dalam ribu unit

** = Tenaga Kerja dalam ribu orang

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa proporsi unit usaha UKM dari tahun ke tahun secara konsisten di atas 99% dibanding non UKM (usaha besar/UB) sebesar 0,03%. Dan proporsi penyerapan tenaga kerja oleh UKM lebih besar di bandingkan penyerapan tenaga kerja oleh non UKM (usaha besar), sehingga UKM sangat penting sebagai penyedia lapangan kerja di Indonesia.

3.8. Alasan UKM lebih mampu bertahan dibandingkan dengan Non UKM

Besar kecilnya skala perusahaan ataupun kategori-kategori lainnya tidak cukup toleran dalam menentukan besarnya kontribusi bagi penyehatan ekonomi.

Kekokohan sosok dunia usaha lebih bergantung pada proses dinamika di pasar, dalam lingkungan politik yang demokratis, sehingga memberikan akses kesempatan yang sama bagi semua pelaku dalam mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya secara optimal.

Usaha Kecil dan Menengah telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis dibandingkan perusahaan-perusahaan besar ataupun non UKM. Ada empat alasan mengapa UKM lebih mampu bertahan dan tidak seterpuruk usaha besar, yaitu (Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2002, hal: 210-211) :

1. Sebagian besar usaha kecil dan menengah menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama. Kelompok ini dicirikan oleh permintaan terhadap perubahan pendapatan (*income elasticity of demand*) yang relatif rendah. Artinya, seandainya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, permintaan atas kelompok barang ini tidak akan meningkat banyak; sebaliknya, jika pendapatan masyarakat merosot-sebagai akibat dari krisis sebagaimana yang terjadi di Indonesia-maka permintaan tidak akan banyak berkurang. Dengan demikian, secara rata-rata tingkat kemunduran UKM tidak separah yang dialami oleh kebanyakan usaha besar ataupun non UKM.
2. Mayoritas usaha kecil dan menengah lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Hal ini terjadi karena akses usaha kecil dan menengah pada aspek perbankan sangat terbatas. Maka, bisa

dipahami kalau di tengah keterpurukan sektor perbankan justru usaha kecil tidak banyak terpengaruh.

3. Pada umumnya usaha kecil dan menengah melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Modal yang terbatas menjadi salah satu faktor yang melatarbelakanginya. Di lain pihak, mengingat struktur pasar yang mereka hadapi mengarah pada pasar persaingan sempurna, tingkat persaingan sangatlah ketat. Akibatnya, yang bangkrut atau keluar dari usaha relatif banyak, namun pemain baru yang masukpun cukup banyak pula, sehingga secara netto jumlah pelaku tidak akan mengalami pengurangan yang berarti. Spesialisasi dan struktur pasar persaingan sempurna inilah yang membuat usaha kecil dan menengah cenderung lebih fleksibel dalam memilih dan berganti jenis usaha, apalagi mengingat bahwa usaha kecil tidak membutuhkan kecanggihan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.
4. Terbentuknya usaha-usaha kecil dan menengah, terutama disektor informal, sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal-akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyaknya unit usaha baru di sektor informal ini pada akhirnya membuat tidak terjadinya penurunan jumlah UKM, bahkan sangat mungkin terjadi peningkatan.

Keberadaan UKM dirasakan sangat strategis dalam berbagai aspek. Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UKM di Indonesia (Jurnal ekonomi pembangunan “Kajian Ekonomi Negara Berkembang” hal 145):

1. Aspek permodalan

UKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan modalnya tidak sesulit perusahaan besar.

2. Aspek tenaga kerja

Tenaga kerja yang diperlukan oleh UKM umumnya tidak menuntut pendidikan formal atau pendidikan tinggi tertentu (Tambunan, 2000). Sebagian besar tenaga kerja yang diperlukan oleh UKM didasarkan atas pengalaman (*learning by doing*) yang terkait dengan faktor historis. Hal ini sering ditemui pada industri kerajinan, ukir, batik.

3. Aspek lokasi

Sebagian besar UKM berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar (Rietveld, 1987, Weijland, 1999).

4. Aspek ketahanan

Peranan UKM khususnya industri kecil telah terbukti memiliki ketahanan yang kuat (*strong survival*) ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi (Sandee, 2000).

B. Hipotesis

Dari cerminan peristiwa yang terjadi di atas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sementara bahwa :

1. Investasi berpengaruh positif terhadap output nasional baik pada masa krisis ekonomi maupun masa normal.
2. Terdapat perbedaan pertumbuhan output UKM pada masa krisis dan masa setelah krisis ekonomi.
3. Terdapat perbedaan pertumbuhan output non UKM pada masa krisis maupun masa sesudah krisis ekonomi.